BAB IV

RELASI ELITE PESANTREN DI KABUPATEN SUMENEP

A. Elite Pesantren sebagai Pemangku Kebijakan

1. Kiai Ramdlan Sirajd, SE., MM.

Kiai Haji Mohammad Ramdlan Siraj lahir pada hari kamis sore di bulan suci ramadlan, tanggal 27 ramadlan 1374 Hijriyah dan bertepatan dengan 18 Mei 1955 Masehi di Desa Karang Campaka. Karena peristiwa penting ini terjadi pada bulan ramadlan, maka diberilah nama "Mohammad Ramdlan" nama ini diberikan langsung oleh abahnya, KH. Moh.Sirajuddin. setelah nama Ramdlan ditambah nama "Siraj" untuk menandakan keturunan, jadilah Moh.Ramdlan Siraj.[1]

Ibu Kiai Ramdlan, Ny. Hj. Badi'ah Ilyas merupakan cucu dari H.Moh. Syarqawi, tokoh agama dan pendiri pondok pesantren Anuqayah, Guluk-Guluk, Sumenep, yang berasal dari Kudus. Kiai Syarqawi putra Kiai Siddiq Roma dan cucu Kiai Kanjeng Sunewa, ulama tersohor di Kudus dan sekitarnya. Selain sebagai tokoh agama, Kiai Syarqawi semasa hidupnya menjadi ikon ulama' Madura dan turut menghidupkan dinamika perdagangan Sumenep yang berpusat di Prenduan. Kiai Syarqawi inilah yang melahirkan banyak tokoh berpengaruh di sumenep, baik dari segi kultural maupun struktural. Hampir seluruh pengasuh pesantren merupakan Bani Syarqawi, tidak hanya di Sumenep tapi juga di pulau

[1] Hambali Rasidi dkk, *Rahasia Politik Kiai Ramdlan* (Sumenep, CV. eLsi Citra Mandiri, 2008), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jawa, seperti di Jember, Situbondo, Bondowoso dan lain sebagainya. Di Sumenep saat ini, keturunan Kiai Syarqawi merupakan elit politik berpengaruh baik di jajaran eksekutif dan legislatif.[2]

Salah satunya kiai Ramdlan adalah keturuan darah biru dalam jaringan kultural di tengah elit NU di sumenep. Sebagai sosok ulama birokrat, kiai Ramdlan dinilai *nyeleneh* (*khelaf*, Madura) dalam berbagai sikap. Asumsi publik, kiai Ramdlan telah mencoreng nama besar kiai NU, namun tak sedikit yag memuji dan setuju atas sikapnya. Yang paling menyita banyak perhatian, ketika menyanyi di depan publik, masuk diskotik, menolak usulan rencana membentuk peraturan daerah (perda) anti maksiat dan menolak rencana undang-undang anti pornoaksi dan pornografi yang sedang digodok DPR RI.[3]

Sosok kiai Ramdlan lahir dan besar dari keluarga besar pesantren yang memiliki genealogis politik lokal di sumenep. Kiai sebagai komando dalam sebuah pesantren memiliki pengaruh kepada masyarakat. Dalam masyarakat tradisional di Sumenep, kiai Ramdlan menjadi jujukan dalam segala hal; persoalan agama, ekonomi, budaya dan politik. Bahkan, memberikan nama pada anaknya, masyarakat masih berkonsultasi kepada kiai, persoalan nama anak dikonsultasikan kepada kiai, apalagi pilihan politik.

[2] Ibid, 5.
[3] Ibid., xxxii.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kiai sebagai figur elit lokal. Kiai menjadi teladan dalam berbagai pola tingkah laku agama dan sosial. Karena itu, dalam masyarakat Islam tradisional Indonesia, kiai memiliki peran yang cukup strategis. Sehingga, kepemimpinan kiai tidak bisa diabaikan dalam proses kehidupan masyarakat.

Kekuatan politik kiai begitu nyata. Posisi kiai di Sumenep begitu mengakar. Bahkan masyarakat lebih mendengarkan saran kiai daripada pesan moral pemerintah. Paradigma religius masyarakat Sumenep masih kuat menepatkan kiai sebagai sosok pialang budaya. Sehingga apa yang keluar dari nasehat kiai menjadi patokan dasar bagi segala aspek kehidupan masyarakat, terutama aspek politik.[4]

a. Profil Pesantren Nurul Islam

Pondok pesantren Nurul Islam Karang Campaka, menurut lembaga bernama Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam. Sedangkan nama yayasannya ialah Pesantren Pondok Nurul Islam. Pondok Pesantren Nurul Islam berdiri pada tahun 1948, dengan status kepemilikan tanah dan bangunannya adalah milik yayasan.

1). Identitas Pondok Pesantren

Nama : Pondok Pesantren Nurul Islam

Alamat : Jln. KH. Moh. Sirojuddin No. 3 Karang Cempaka Bluto

Sifat : Mandataris Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Islam

[4] Ibid, xiv-xv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status : Milik Yayasan, Surat kepemilikan No. 03 Luas Tanah 4016 M.

Visi dan Misi Pondok Pesantren

Visi

Membentuk santri berwawasan global, mempunyai iptek dan imtaq serta mampu bersaing, kreatif dan produktif serta menjunjung nilai-nilai ahlaqul karimah. Indikator-indikator :

a). Mampu bertukar kata santun dan terkontrol

b). Cakap, inovatif, dan produktif

c). Menguasai kitabiyah

d). Mantap dan Istiqomah beribadah

Misi

a). Membentuk santri ke arah yang lebih positif, kreatif, dan inovatif

b). Mewujudkan kinerja yang ideal serta memelihara citra pondok pesantren

a). Berkehidupan religius dalam meningkatkan minat baca kitab

b). Meningkatkan suasana yang demokrasi dan keterbukaan

c). Meningkatkan profesionalisme santri dan mu'allim

Tujuan

Tujuan pondok pesantren secara garis besarnya membentuk kepribadian dan sikap santri yang berakhlakul karimah serta mempunyai wawasan keilmuan yang luas terutama ilmu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keagamaan tanpa mengenyampingkan ilmu *exact* yang dikenal dengan sains dan tekhnologi.

Pada umumnya pondok pesantren ingin membentuk santri yang mempunyai ilmu pengetahuan luas dihiasi dengan moral, akhlaq dan budi pekerti yang baik, sehingga ilmu pengetahuan yang dimiliki dapat tersalurkan serta digunakan kepada hal-hal yang bersifat positif dan bermanfaat kepada dirinya maupun kepada orang lain.

2). Pengurus Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Campaka Bluto Sumenep

a. Kepala P3NI : K. Abd. Razaq, AR
b. Kaur TU : Didik Sulaiman, S.Pd
c. Staf TU : Iskandar
d. Waka Bidang Keuangan : Abd. Latif, S.Pd.I
e. Waka Bidang Kurikulum : Abd. Hamid, M.Pd.I
f. Waka Bidang Ubudiyah : Abd. Hamid, M.Pd.I
g. Waka Bidang Kamtib : K.M. Rifa'ie, A.Md
h. Waka Bidang Sarana prasarana : Supaili

3). Letak Geografis Pondok Pesantren

Pondok pesantren Nurul Islam Karang Campaka terletak di Desa Karang Campaka, Kecamatan Bluto, Kabupaten Sumenep. Letak pondok pesantren tersebut kurang lebih 5 KM ke arah barat dari Kecamatan Bluto, melalui jalan raya menuju daerah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Lenteng dan Kecamatan Guluk-Guluk. Pondok pesantren Nurul Islam juga dekat dengan perkampungan dan posisinya agak masuk kedalam sekitar 200 meter dari jalan raya.

Letak pondok pesantren Nurul Islam Karang Campaka berbatasan dengan beberapa desa lainnya, sebelah barat berbatasan dengan desa Sera Timur, sebelah utara berbatasan dengan desa Aeng Tong-Tong, sebelah timur berbatasan dengan desa Aeng Beje Raje dan sebelah selatan berbatasan dengan desa Pekandangan Sangrah. Sedangkan yang membatasi antar desa tersebut terhampar berbagai lahan pertanian penduduk desa setempat. Sehingga masih terasa nuansa pedesaan yang asri di lingkungan pondok pesantren Nurul Islam Karang Campaka. Saat in pesantren Nurul Islam telah memiliki jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai pendidikan tinggi yakni STIQNIS pada tahun 2014.

Suasana desa terasa sejuk cenderung dingin walaupun tidak terlalu dingin. Karena desa tersebut terletak di dataran tinggi kalau dilihat dari beberapa daerah di Kabupaten Sumenep secara umum. Hal tersebut juga di dukung oleh lingkungan disekitar pesantren yang banyak terdapat pepohonan dengan keadaan alam yang subur.

Semua itu mendukung untuk para santri merasa betah tinggal di pondok pesantren tersebut. Sedangkan akses untuk mendapatkan air di lingkungan pondok pesantren juga tidak terlalu sulit,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdapatnya beberapa aliran sungai di Desa Karang Cempaka dan terdapat pula sumur-sumur warga. Sehingga dapat dikatakan untuk persediaan air di pondok Pesantren Nurul Islam Karang Campaka cukup memadai dan tidak kekurangan air.

4). Jumlah Santri dan Sebaran Asal Santri

Jumlah santri mukim Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Campaka, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir berjumlah 126 orang untuk santri putra, dan jumlah untuk santri putri adalah 170 orang. Sedangkan Sedangkan untuk sebaran asal para santri mukim, khususnya di Pondok Pesantren Nurul Islam Karang Campaka berasal dari desa-desa di Kabupaten Sumenep seperti berasal dari Pulau Giliraja, Pagar Batu, Lobuk, Mandala Rubaru, Paberasan, Talang Saronggi dan sebagian berasal dari pinggiran kabupaten lain seperti Jember, Bondowoso dan Situbondo.[5]

b. Keadaan Sosiologis Lingkungan Pesantren

Keseluruhan masyarakat di desa Karang Campaka adalah pemeluk agama Islam. Keberadaan pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat desa Karang Campaka tidak hanya menciptakan nuansa desa santri, namun secara natural membentuk karakter masyarakat yang agamis.

Sehubungan dengan sosial masyarakat, warga desa Karang Cempaka memiliki keterikatan yang sangat erat walaupun tidak

[5] Dokumen Pesantren Nurul Islam, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

satu darah atau sekeluarga, hal ini terlihat dari setiap kegiatan-kegiatan sosial seperti tahlilan, yasinan, sampai kegiatan-kegiatan seperti menjenguk tetangga sakit, hamil dan kematian, yang caranya pun dengan cara berkumpul atau berkelompok sembari berjalan bersama sebagai gambaran bahwa warga desa Karang Cempaka memiliki keterikatan yang kuat satu sama lain.

Sedangkan mata pencaharian masyarakat desa Karang Campaka sendiri mayoritas adalah petani. Dari bertani padi, jagung, tembakau, dan beberapa jenis tanaman yang dapat dicocok tanam serta sesuai dengan musim yang bergulir. Sebagian ada pula yang bekerja sebagai pedagang di pasar, memelihara hewan ternak, dan sebagian kecil ada yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun lembaga yayasan tertentu.

c. Kebijakan Pendidikan KH. Ramdlan Siradj

Bupati Ramdlan mendesain sistem pemerintahan berjalan efiesien dan sesuai aturan pemerintah. Dia sosok bupati yang independen, *istiqomah*, cerdas, dan ikhlas dalam setiap mengambil kebijakan. Ramdlan bercita menghidupkan budaya kerja sebagai referensi utama. Sebagai pemegang hak preogratif, dia memutuskan sendiri dalam menentukan karier seorang birokrat. Bukan berarti dia menutup aspirasi dari luar sistem. Sebagai pejabat publik dan berangkat dari jalur politik kiai Ramdlan tetap mendengar aspirasi yang berkembang dari luar sebagai masukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anehnya, di luar rencana, sikap bijak kiai Ramdlan kepada staf birokratinya, menjadi strategi politik jitu yang mengundang simpati.

> "Bicara tentang kepemimpinan sebagai pemangku kebijakan beliau menjelaskan sesungguhnya kepemimpinan adalah mengemban amanah beliau mengemplementasikan dengan tiga model (1) kepemimpinan yang bersih *(as-siqdu)* beliau lebih lanjut menjelaskan jangan kotori kebijakan seorang pemimpin, jangan intervensi oleh siapapun demi mengambil keuntungan, beliau mengungkapkan selama memimpin banyak godaan yang mengarah pada perbuatan menyimpang seperti contoh tidak pernah menerima upeti atau pemberian dari siapapun yang sifatnya dalam wilayah birokrasi, (2) kepemimpinan yang elegan, beliau menerapkan kepemimpinan yang tidak kaku, enjoy sehingga bawahan beliau merasa nyaman dan tidak cenderung sungkan, (3) pemimpin harus menghindari *like and dislike*, hal ini penting dalam menjaga diri dari berbagai pihak yang berusaha mencari celah dari berbagai hasutan, fitnah yang sifatnya menjatuhkan dan dapat menyebabkan memecah belah.[6]

Terobosan egaliter kiai Ramdlan ini mengukir sejarah dalam sistem pemerintahan Kabupaten Sumenep. Sebagai bupati, dia enggan melakukan interversi kebijakan dan menerima upeti dari sebuah program pembangunan yang bukan haknya. Dia meretas transisi birokratik arti sistem pemerintahan, kendati tidak formal.[7]

Sebagian kalangan menilai, prestasi kepemimpinan bupati Ramdlan biasa-biasa saja, tidak ada yang menonjol. Kendati demikian, kucuran bantuan sosial keagamaan dan pembangunan

---

[6] Ramdlan Siradj, *Wawancara*, Sumenep, 02 Desember 2015.
[7] Rasidi, *Rahasia*, xxi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

infrastruktur yang terpusat ke pesantren dan pelosok desa, seperti pavingisasi, bantuan MCK ke mushalla-masjid, pembangunan jembatan, dermaga dan pengaspalan jalan, benar-benar dirasakan masyarakat.

Sebagian warga perkotaan menilai kinerja Bupati Ramdlan mengalami kemunduran bila disejajarkan dengan bupati pendahulu. Hal ini akibat wajah kota nyaris tak berubah. Sikap mengenyampingkan pembangunan di dalam kota, karena bagi kiai Ramdlan, pembangunan dalam kota tergolong maju, banyak penerangan dan pembangunan gedung. Sementara di pelosok desa sangat jauh terbelakang. Berdasar asumsi tersebut, kiai Ramdlan hendak meratakan pembangunan secara keseluruhan termasuk kepulauan yang selama ini di anak tirikan.

Kebijakan sikap pemerataan desa dalam bidang pembangunan tergolong wajar karena puluhan tahun desa tidak menikmati ‘’kue’’ pembagunan. Kalaupun ada, hanya sebagai objek bukan subjek. Lembaga keagamaan seperti pondok pesantren (ponpes), madrasah diniyah, masjid, dan mushalla tersebar di pelosok desa. Begitu pula sarana transportasi seperti jalan dan jembatan. Pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Sementara mayoritas penduduk Sumenep berada di pedesaan termasuk kepulauan.[8]

“Bicara kebijakan pendidikan selama kepemimpinan beliau dengan meningkatkan SDM dengan menggandeng LP Ma’arif NU dengan memberikan besiswa studi lanjut bagi guru MI/SDI swasta yang bekerja sama dengan STIKA Guluk-Guluk dalam sebagai lembaga yang melaksanakan penyelengaraan perkuliahan, kebijakan ini karena melihat lembaga pendidikan swasta lebih banyak dari lembaga pendidikan umum negeri dan tentunya program ini disambut baik oleh para guru swasta yang mayoritas

[8] Ibid., xx-xxi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> dibawah naungan pesantren. Selain itu tidak hanya peningkatan SDM, namun juga bantuan yang berupa peningkatan sarana prasarana seperti dalam bentuk blogrand, termasuk didalamnya kesejahteraan guru swasta seperti bantuan guru kontrak, transport guru, Bantuan siswa miskin, BPPDGS semuanya dialokasikan dari dana APBD Kabupaten Sumenep"
>
> Terkait dengan elite pesantren yang berada di wilayah pemerintahan memang cenderung pro kontra, namun sejauh ini, elit pesantren masih dipercaya mengemban amanah ketimbang pihak lain, karena ketika berada di wilayah politik yang membawa nama kiai yang menjadi panutan masyarakat dan satu sisi berada di wilayah birokrasi atau pemerintahan kebijakan yang diambil harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sehingga stigma yang cenderung negatif, dapat menjadi pembeda yang positif dibandingkan dengan pemimpin yang bukan berasal dari elit pesantren. Tentunya seperti tadi disebut berjuang dan berdakwah bisa juga melalui politik dan pemerintahan dengan berbagai kebijakan demi memajukan masyarakat.[9]

Kiai melakukan dakwah politik dengan menerjemahkan nilai-nilai ajaran Islam secara aktual dan transformatif dalam kehidupan masyarakat. Perubahan bentuk kiai Ramdlan, yang semula sebagai ulama *salaf* (tiap hari bergelut kitab kuning di pesantren) lalu berada di dunia pemerintahan dan bersikap liberal memahami Islam, dapat digolongkan sebagai upaya mentransformasikan nilai Islam, dari kondisi mitis ke ontologis. Atau dalam pemikiran sejumlah pembaharu Islam, seperti Mohammad Arkoun (Nalar Islam), Hasan Hanafi (Kiri Islam), Abdullahi Ahmed An Naim (Dekonstruksi Syari'ah), Hasan Sho'ub (Revolusi Pemikiran Islam), serta Nasr Hamid Abu Zayd, Muhammad 'Abid al-jabari, Ali Harb, Abdul Karim Soroush, Asygar Ali Engineer, sebagai sebuah pemikiran, kalau tak mau disebut ijtihad,

[9] Ramdlan Siradj, *Wawancara*, Sumenep, 02 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari norma etik (dasar hukum islam tradisional) ke pemikiran sosial universal (kosmopolit). Dengan demikian, Islam mampu mentransformasi dan merevitalisai nilai tradisi sebagai ruh perubahan secara terus menerus. Langkah ini, bukan mencampakkan sebuah tradisi, tetapi sebagai modal sosial untuk mencerahkan masyarakat. Dari sini tantangan Islam, menjawab tantangan zaman secara alternatif tanpa kehilangan dimensi otentitasnya dipertaruhkan eksistensinya.[10]

Peneliti melihat ada keinginan yang kuat dari pemimpin yang lahir dari elite pesantren untuk menata dan memperbaiki bangsa, walaupun tidak semua, namun hal ini bisa dilihat bagaimana komitmen yang dibangun dalam berjuang dalam bentuk kebijakan, dengan catatan tidak ada yang menunggangi dan tidak terikat dengan pihak yang memang ingin melakukan dengan tujuan kepentingan pribadi, hal ini penting karena sekarang banyak pemimpin yang ada dispsonsori oleh korporasi, sehingga ketika berhasil menjadi pemimpin banyak kebijakan yang disetting karena sang pemimpin mempunyai hutang jasa dan dana dalam mengantarkannya menjadi seorang pemimpin.

2. KH. Dr. A. Busyra Karim, M.Si.

KH A. Busyro Karim lahir dari Rahim seorang *hafidzah* (perempuan yang hafal al-Qur'an), Nyai Hj. Nuraniyah di Desa Beraji, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Nuraniyah hafal al-Qur'an 30 juz sebelum mengandung Busyro. Ayah Busyro, KH Abdul Karim,

[10] Rasidi, *Rahasia*, xxv.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seorang ulama' kharismatik dari Desa Bungbungan Kecamatan Bluto. Busyro putra tunggal dan ''yatim'' pada usia 12 tahun.

Nyai Nuraniyah menikah pada usia muda ibunya, Nyai Halimatus Sa'diyah menjodohkan Nuraniyah dengan kiai Karim, putra kiai Haji Mohammad Thoha Bluto, saudara kandung suaminya, kiai Haji Abd. Said. Sehingga terjadi pernikahan saudara sepupu antara Nuraniyah dengan Abdul Karim.

Busyro kecil lahir pada hari senin 10 januari 1961, sebelum ayam berkokok atau sekitar pukul 03.00 dini hari jelang azan subuh. Tanggal lahir ini, justru berbeda pada ijazah sekolah dasar (SD) yang tetulis, 1 Mei 1961. Bukan hanya itu, namanya juga ikut berubah menjadi Busyro bin Ali Bahar. Ali Bahar masuk bagian nama Busyro karena para guru SD mengenal Ali Bahar sebagai ayahnya. Sebab saat Busyro berpergian atau ke sekolah, paman Ali Bahar-lah yang menemaninya. Sehingga, para gurunya menyebut Busyro bin Ali Bahar.[11]

Setelah lulus SD, Busyro kecil *nyantri* di pondok pesatren Babus Salam, (sekarang bernama pesantren Mathaliul Anwar), desa pengarangan Kecamatan Kota Sumenep. Selain mondok, Busyro juga sekolah di PGA 6 tahun. Enam tahun dia habiskan I pesantren asuhan pamannya, kiai Haji Abdullah. Kendati berada di pesantren saudara sepupu ibunya, Busyro lebih memilih tinggal bersama santri lain. Nyai

[11] Hambali Rasidi, *Berjuang Seorang Diri* (Sumenep: CV. eLSI Citra Mandiri 2008), 1-2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Salma, istri Kiai Abdullah, putra Nyai Rukayyah, saudara kandung Kiai Said, kakek Busyro.[12]

Setelah lulus kuliah kiai Busyro berda'wah baik di media atau panggung kepanggung, namun sejak tahun 1998 ia berubah haluan dengan terjun ke dunia politik dan kiprah keberhasilannya adalah memimpin PKB di awal berdirinya di Sumenep menjadi tanda awal kemampuan *leadership*-nya. Pada pemilu 1999, PKB Sumenep di bawah kendalinya mampu meraup suara yang sangat signifikan dengan total suara 376.058, dan memperoleh 25 kursi dari 45 kursi di DPRD Sumenep. Perolehan suara PKB Sumenep menempati pada posisi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten yang lain di Madura.[13]

Hal ini dilakukan kiai Busyro dalam sosialisasi yang maksimal dengan membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih PKB. Dengan dukungan yang besar terhadap PKB, secara otomatis tidak bisa dilepaskan dari kehebatan pengelolaan dan kepemimpinan di PKB pada saat itu.[14]

---

[12] Karim, *Jejak*, 25.

[13] A. Busyro Karim, *Indonesia, Globalisasi dan Otonomi Daerah: Beberapa pemikiran untuk Sumenep*, dalam Ali humaidi ed (Yogyakarta, Pilar Media, 2005), 75.

[14] Kiai Busyro dalam memimpin PKB telah mampu menfungsikan fungsi partai dengan baik. Sesuai dengan teori kepartaian yang menyebutkan bahwa pelaksanaan fungsi-fungsi strategis yang disandang partai politik, sekaligus tetap menjadi kendali iklim stabilitas, karena kegagalan partai menjalankan peranan politiknya dapat mengakibatkan terjadinya suatu kemunduran bagi penegakan prinsip kedaulatan rakyat dan menjadi awal bagi munculnya sikap politik mayoritas publik yang apatis.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemampuan mengelola PKB itulah yang membuat kiai Busyro dipercaya memimpin DPRD Sumenep. Keberhasilan dengan prestasi yang luar biasa tersebut menjadi alasan kuat bagi kalangan anggota DPRD Sumenep untuk memberikan kepercayaan yang sangat strategis sebagai ketua DPRD. Kemampuan memanej dan mengelola kepemimpinan di DPRD, dibuktikan dengan baik. Dengan posisi sebagai pimpinan dewan, kiai Busyro semakin disegani oleh anggota dewan lainnya.

Kiai Busyro selama dua periode (2000-2004 dan 2004-2009) menjabat ketua DPRD kabupaten Sumenep, bukan tanpa faktor yang sangat mendasar, selain faktor keahliannya dalam berpolitik, kiai Busyro juga dikenal memiliki keistimewaan tersendiri dalam memimpin sidang-sidang parlemen. Salah satu kelebihan yang dimilikinya saat berada di gedung DPRD adalah aura kharismatik dan kecerdasannya. Sehingga disegani oleh kawan maupun lawan politiknya. Kiai Busyro selalu menjaga bentuk kepemimpinan kesetaraan. Hal ini ditunjukkan ketika memimpin sidang di perlemen. Kiai Busyro memimpin dengan gaya moderat, akomodatif, toleran, arif dan bijaksana.[15]

a. Profil Pesantren Al-Karimiyyah

Pondok Pesantren Al Karimiyyah selanjutnya disebut PP Al Karimiyyah pada awalnya merupakan pesantren biasa. Pesentren ini dirintis oleh KH. Kariman bin Birajuda bin Maljuna (keturunan ke-6

[15] Karim, *Jejak*, 91-92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari Pangeran Katandur Sumenep, sekaligus cucu dari Sunan Kudus Jawa Tengah) bersama istrinya, Ny. Haerati sekitar tahun 1910 M. KH. Kariman ini merupakan tokoh ulama asal Desa Karangduak Sumenep yang diutus oleh ayahandanya, KH. Birajuda untuk melakukan dakwah di kampung Karang Desa Beraji Gapura.

Tujuan dakwah inilah kemudian KH. Kariman menetap di Kampung Karang Beraji. Dalam perjalanan dakwahnya, ia dikaruniai empat orang putra: 1) KH. Miftahul Arifin (Pengasuh Pondok Pesantren Pajinggaan Bangselok Kota Sumenep), 2) Ny. Ruqayyah (berada di Pondok Pesantren Mathali'ul Anwar Pangarangan Kepanjen Sumenep), 3) KH. Muntaha (Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Bluto), dan K. Mohammad Sa'id (penerus kepemimpinan KH. Kariman di Pesantren Kampung Karang Beraji sekaligus sebagai Kakek KH. A. Busyro Karim, Pengasuh Pondok Pesantren Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep sekarang). Walaupun banyak secara teknis diembankan pada K. Wafi Kahtib salah satu yang dipercaya untuk memimpin dari unsur keluaraga.

Sepeninggal KH. Kariman, sekitar tahun 1920-an, K. Mohammad Sa'id meneruskan misi dakwah yang telah dirintis oleh KH. Kariman. Pada masa kepemimpinan K. Mohammad Sa'id ini, perkembangan pesantren sudah mulai terlihat. Banyak santri berdatangan dari berbagai daerah di Sumenep, bahkan ada yang dari pulau Jawa untuk menuntut ilmu di Pesantren Karang Beraji ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

K. Mohammad Sa'id dalam mengasuh pesantren Karang Beraji ini, didampingi oleh isterinya Ny. Halimatus Sa'diyyah. Dari perkawinannya ini beliau dikaruniai tiga orang putra: 1) Ny. Hj. Nuraniyyah, dan 2) K. Mohammad Ali Bahar dan 3) K. Mohammad Hayat. K. Mohammad Sa'id ditakdirkan wafat dalam usia muda. Beliau wafat sekitar tahun 1955-an. Akhirnya, misi dakwah pesantren dilanjutkan oleh isterinya Ny. Halimatus Sa'diyyah. Tahun 1959, Ny. Hj. Nuraniyyah menikah dengan KH. Abd. Karim Toha, putra dari KH. Muntaha. Dengan pernikahan ini beliau dikaruniai seorang putra yaitu KH.A. Busyro Karim.[16]

Perkembangan selanjutnya pada tahun 1962, KH. Abd. Karim Toha sangat diperlukan oleh Ayahandanya KH. Munthaha di Bluto untuk membantu mengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Blumbungan Bluto Sumenep, akhirnya beliau pindah tinggal di Bluto. Sehingga, kepemimpinan pesantren diasuh lagi oleh Ny. Halimatus Sa'diyyah dibantu oleh Ny. Hj. Nuraniyyah. Realitas ini terjadi karena putra penerus yaitu KH. A. Busyro Karim, masih kecil. Pada masa ini pesantren mulai mengenal pembelajaran klasikal yaitu didirikan lembaga formal MI Darul Ulum sekaligus mengubah nama Pesantren Karang menjadi Pesantren Darul Ulum Beraji Gapura Sumenep.

Pada masa ini, diakui terjadi kemerosotan dalam hal kuantitas santri. Bahkan santri yang pada masa dulu banyak yang menetap di

[16] Lebih lengkapnya lihat dalam buku Memori Wisuda STIT Al-Karimiyyah tahun 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pesantren pada masa ini sudah tidak ada lagi yang menetap. Hanya yang tersisa adalah santri *colokan* yang datang malam hari untuk berjamaah salat maghrib, mengaji kemudian menginap di pesantren, pagi pulang ke rumahnya masing-masing, siang hari datang lagi untuk mengaji Al Qur'an. Mereka pun rata-rata adalah anak-anak dari desa sekitar desa Beraji, yakni berasal desa Poja dan Karang Budi.

Perjalanan selanjutnya, tahun 1987, ketika putra dari Ny. Hj. Nuraniyyah, A. Busyro Karim, telah menyelesaikan pendidikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, beliau kembali ke pesantren dan menjadi penerus ke-4 kepemimpinan pesantren. Beliau kemudian merubah nama Pondok Pesantren Darul Ulum menjadi Pondok Pesantren As Sa'diyyah Beraji Gapura Sumenep (yang dinisbatkan kepada nenek beliau Ny. Halimatus Sa'diyyah sebagai pengasuh ke-3 pada tahun 1962-1970-an). Pada tahun 1994 diubah lagi menjadi Pondok Pesantren Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep. Perubahan ini dilakukan untuk menisbatkan pada pembabat dan perintis berdirinya pesantren di desa Beraji ini yaitu KH. Kariman Birajuda.

Pada masa beliau geliat kemajuan pondok pesantren mulai terlihat kembali, dari pemugaran Masjid Jami' Al Karimiyyah yang telah dibangun sekitar tahun 1928 pada masa kepemimpinan K. Mohammad Sa'id hingga didirikannya madrasah ibtidaiyyah. Pada tahun 1988 itu pula sudah dirintis Pondok Pesantren Al Karimiyyah khusus bagi santri putra sedangkan santri putri pada tahun 1992.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak tahun 1988 sampai sekarang beliau telah menjadikan lembaga ini berkembang pesat mulai diubahnya MI Darul Ulum menjadi MI As Sa'diyyah tahun 1988, didirikannya MTs Al Karimiyyah tahun 1992, Lembaga Tahfid Al Qur'an tahun 1994, MA Al Karimiyyah tahun 1996, TK Al Karimiyyah tahun 1998, Madin Al Karimiyyah tahun 2000, PAUD Al Karimiyyah tahun 2002, dan STIA Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep tahun 2008.[17]

Sebagai pendidikan tinggi, STIA berubah menjadi STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep telah diakreditasi untuk pertama kalinya pada tahun 2010 untuk program studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dengan status akreditasi C dan tahun 2012 untuk program studi Pendidikan Bahasa Arab (PBA) juga dengan status akreditasi C.

Pada tahun 2014 ini STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep membuka program studi baru yaitu program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah (PGMI) dan program studi Pendidikan Guru Raudlatul Adhfal (PGRA) yang telah mendapatkan legalisasi dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 2014 dengan nomor : 5516 tahun 2014

[17] Peresmian dan orasi ilmiah Sekolah Tinggi Islam al-Karmiyyah (STIA) dihadori langsung oleh Ketua Kopetais Wilayah IV Surabaya Oleh Prof. Dr. HM. Ridlwan Nasir, MA., dengan tema "Perguruan Tinggi Islam di Pondok Pesantren; Peluang dan Tantangan" pada tanggal 11 November 2008.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejak awal tahun berdiri pada tahun 2008 berbagai pegantian pucuk pimpinan sampai sekarang STIT Al Karimiyyah Beraji Gapura Sumenep telah dipimpin oleh: 1). Drs. KH. Abuya Busyro Kariem, M.Si untuk periode 2008-2010, 2). Drs. KH. Ah. Mutam Muchtar, M.Pd.I pada periode 2011-2012, 3). Zainuddin Hasan, M.Pd.I untuk periode 2012-2013, dan 4). Ach. Syaiful A'la, M.Pd.I pada periode 2013-2015. 5), Ach. Syaiful A'la 2015 -2018.[18]

b. Kebijakan Pendidikan KH. A. Busyro Karim

Pendidikan adalah tonggak peradaban. Maju dan tidaknya suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemajuan pendidikan yang dikembangkan. Sebagai tiang peradaban, pendidikan harus terus menerus dikembangkan dengan maksimal dan komitmen yang sungguh-sungguh. Pembangunan pendidikan harus diarahkan untuk semua dan tanpa diskriminasi, antara lembaga pendidikan swasta maupun negeri. Era reformasi merupakan momentum untuk mengubah cara pandang pemerintah terhadap pengembangan pendidikan. Tidak seperti yang pernah terjadi pada masa lalu, yang menomor duakan lembaga pendidikan swasta dan mengedepankan lembaga pendidikan negeri. Pola pembangunan pendidikan yang diskriminasi jelas-jelas berlawanan dengan cita-cita UUD 1945 yang mengamanahkan pemerataan pendidikan untuk semua, agar tercipta manusia seutuhnya.

[18] Dokumen Pesantren AL Karimiyyah, 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membangun pendidikan yang universal berarti membangun pendidikan secara utuh dan merata. Seluruh lembaga pendidikan harus mendapatkan perlakuan dan diperhatikan sama. Sebab membangun pendidikan tidak bisa dilakukan dengan setengah hati dan menafikan yang lain. Kebijakan pendidikan harus secara murni diniatkan atas dasar untuk membangun pendidikan kearah yang lebih baik.

1) Mengikis diskriminasi antara madrasah-negeri

Sebelum reformasi digulirkan, pola pendidikan masih diskriminasi. Proses pembangunan pendidikan tampak berjalan pincang. Ada yang dipriotitaskan, dan ada yang dianaktirikan. Hal ini terjadi pada madrasah. Sebagai lembaga pendidikan berbasis agama masih digemari karena biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat bawah. Madrasah sebelum reformasi menjadi lembaga pendidikan yang dianaktirikan. Madrasah yang menyebar di seluruh pelosok Sumenep sejatinya mendapatkan perhatian serius melalui kebijakan yang tepat. Sehingga madrasah menjadi salah satu potensi besar bagi pengembangan pendidikan di Sumenep yang memang menjadi tumpuan masyarakat.

Keterkaitan ini, kiai Busyro memandang perlu adanya kebijakan yang proporsional terhdap Madrasah. Bukan hanya itu saja, komitmen pemerintah terhadap pengembangan pendidikan di Sumenep harus digerakkan kearah yang sangat tepat. Berbagai kebijakan di sektor pendidikan perlu dilakukan dan dirumuskan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kebijakan legislasi. Mulai memberikan bantuan fisik, Bantuan Penyelengaraan Pendidikan Madarasah Diniyah dan Swasta, beasiswa baik bagi siswa ataupun mahasiswa, pengentasan buta huruf, pengembangan PAUD dan SMK dan uang transport untuk guru.

Hal itu dilakukannya agar pendidikan di Sumenep bisa berjalan sesuai dengan harapan. Baginya, seluruh lembaga pendidikan harus digerakkan dengan garis kebijakan yang sama, tidak perlu ada yang dinomorduakan.

2) Pendidikan berbasis skill dan potensi lokal

Sosok Kiai Busyro yang lebih akrab dipanggil Buya berpandangan untuk memajukan dunia pendidikan Sumenep, pemerintah harus mengembangkan pendidikan berbasis skill dan potensi lokal daerah. Daerah pesisir pantai dan daerah pengunngan serta pertanian juga menjadi perhatian besar pemerintah. Caranya adalah mendirikan sekolah kejuruan yang berlokasi di daerah basis potensi. Seperti kepulauan atau daerah pesisir pantai harus dibangun sekolah kelautan dan perikanan. Sedangkan daerah basis pertanian di buka sekolah kejuruan berbasis produk agrobisnis dengan catatan disesuaikan dengan kekayaan suatu daerah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendidikan menjadi fenomena di tengah masyarakat. Pendidikan masih belum mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarkat. Karena pola pendidikan yang ada belum menjadi media pengembangan skiil anak didik. Sehingga, pendidikan cenderung melahirkan orang-orang pintar, tetapi tidak mampu melahirkan orang-orang yang memiliki spesialisasi bidang tertentu, sehingga menutup lapangan kerja. Dengan kata lain, pendidikan masih melahirkan orang-orang lemah yang tidak kreatif dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Padahal pada tahun-tahun yang akan datang, orang sudah berbicara skiil. Oleh karena itu, di Sumenep perlu segera memperbanyak sekolah-sekolah kejuruan (SMK), khusus untuk bidang-bidang tertentu yang menjadi kebutuhan masyarakat, misalnya bidang pertanian, kelautan dan lain sebagainya.

> "Sebagai salah satu elite pesantren yang berada di wilayah birokrasi, beliau Kiai Busyro mengatakan saya datang dari pesantren untuk Sumenep dari santri untuk Sumenep dalam arti memajukan Sumenep, kebijakan yang diambil adalah bagaimana lembaga pendidikan swasta yang nota beni berbasis pesantren dan di bawah binaan yayasan, Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan dana stimulan dalam meningkatkan lembaga pendidikan pesantren. Hal ini ditandai dengan pengakuan keberpihakan APBD Kabupten Sumenep terhadap lembaga pendidikan swasta,[19]

Hal itu dilakukan agar pendidikan di Sumenep tidak hanya berjalan di tempat, tetapi diarahkan pada upaya untuk membangun

[19] A. Busyro Karim, *Wawancara*, Sumenep, 06 Desember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas pendidikan yang sesuai dengan kenyataan yang ada saat ini. Kualitas pendidikan, menurut kiai Busyro harus menjadi garapan serius pemerintah kabupaten, karena dengan pendidikan membangun SDM yang unggul akan dapat dilakukan.

> Ketika elite pesantren berada pada birokrasi tentunya ini akan berdampak bagaimana membangun komunikasi yang strategis dengan pemerintah, dimana sejak awal lembaga pendidikan swasta sejak awal cenderung ternomerduakan, ketika elite pesantren berada dalam pemerintahan bagaimana elite pesantren dapat berkontribusi memberikan kesempatan pada lembaga pendidikan swasta berbasis pesantren untuk berbenah dan dapat diberikan kesempatan dalam mengembangkan potensi yang dimiliki, sehingga pemerintah sangat apresiatif sekali ketika banyak pembangunan SMK pesantren, pengelola atau yayasan membina dengan baik dan pemerintah dapat mengalokasikan dengan memberikan suntikan dana demi kemajuan pendidikan tidak cukup itu semua harus ditopang dengan SDM yang memang perlu disapkan demi dapat berkontribusi positif pada pembangunan bangsa yang semakin kompetetitif. Hal ini penting untuk meminimalisir persepsi yang cenderung negatif ketika elite pesantren ada di pemerintahan, jadi harus ada elite pesantren yang tetap mengurus pesantren dan harus ada yang berjuang dalam birokrasi demi tujuan mulia memajukan generasi bangsa kita.[20]

Membangun SDM yang dapat bersaing, adalah membangun pendidikanyang benar-benar berkualitas dengan tetap mempertahankan potensi dan karakter lokal yang ada. Sebab, pendidikan Sumenep memiliki ciri khas yang tidak boleh dinafikan, sehingga pendidikan yang dikembangkan tidak malah mengubur nilai-nilai dan karakter khusus masyarakat Sumenep.

[20] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya pengembangan dan pembangunan sumber daya manusia berlangsung sepanjang kehidupan melalui siklus kehidupan yang dilakukan melalui berbagai bidang pembangunan yang saling berkaitan satu sama lain, seperti pendidikan, pelatihan kerja, ketenagakerjaan, kesehatan dan gizi, serta bidang-bidang lainnya. Namun demikian, di antara bidang-bidang tersebut, pendidikan merupakan komponen yang paling mendasar karena pendidikan dapat memberikan kontiriusi terhadap pembangunan di bidang lainnya. Peningkatan kualitas SDM melalui bentuk-bentuk lain seperti kesehatan dan gizi, pelatihan kerja, ketenaga kerjaan akan berhasil jika didukung oleh keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan.

Urgensi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM (*human capital investment*) sehingga mampu menciptakan iklim yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk turut andil atau berperan dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Dalam konteks ini pendidikan harus diarahkan dalam upaya mengembangkan dan menyebarluaskan nilai dan sikap produktivitas Sumber Daya Manusia melalui pengembangan dua kemampuan sekaligus, yatu (1) kemampuan teknis seperti peningkatan penguasaan kecakapan, profesi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan lapangan kerja yang berubah, dan (2) kemampuan lain dalam kaitan dengan budaya yang mendorong SDM

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menjadi kekuatan penggerak pembangunan, seperti wawasan penalaran, etos kerja, orientasi ke depan, kamampuan belajar secara terus-menerus dan sejenisnya.

Kemampuan untuk pengembangan kedua kekuatan SDM. Dengan demikian, pendidikan sebagai suatu investasi SDM memiliki fungsi yang paling menonjol yaitu sebagai sarana untuk memberdayakan (*empowering*) masyarakat, yang pada gilirannya akan memberikan tingkat balikan (*economic rate of return*) yang tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Namun cara berpikir seperti ini di Indonesia belum berkembang baik di kalangan politisi, pemerintah, birokrasi, masyarakat luas bahkan di kalangan peneliti, sehingga menimbulkan hambatan yang cukup mendasar dalam menstrukturkan kembali pembangunan disektor pendidikan. Akibatnya penganggaran yang besar dianggap hanya menghabiskan anggaran dan pendidikan dianggap bukan merupakan prioritas pembangunan.

Pada dasarnya investasi SDM berbeda dengan investasi pada sektor fisik, karena pada sektor fisik rentang waktu (*lead time*) antara investasi dengan tingkat baliknya lebih terukur (*measurable*) dalam jangka pendek. Investasi pendidikan lebih berangka panjang, tingkat balikan terhadap investasi pendidikan tidak dapat dinikmati dalam ukuran waktu 1 atau 2 tahun, melainkan puluhan tahun. Indikator-indikator manfaat pendidikan juga lebih halus dan tidak selalu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tampak secara langsung bahkan mungkin tidak selalu dapat diukur, sehingga harus diamati melalui proksi-proksi atau indikator-indikator yang tidak langsung.[21]

Untuk, pembangunan pendidikan Sumenep harus bisa mengcover segala potensi daerah secara komprehensif, meliputi potensi religius, budaya, sosiologi, sumber daya alam (pertanian, kelautan, perikanan dan pertambangan), sehingga pendidikan berbasis skill yang dikembangkan pada akhirnya akan tetap kembali untuk mengembangkan setiap potensi yang dimiliki.

Kemajuan dalam konteks pengembangan otonomi pendidikan, kiai Busyro menawarkan dalam memajukan pendidikan Sumenep. *Pertama,* Sumenep perlu memiliki landasan hukum dan payung politik, perlu adanya peraturan daerah yang mengatur penyelenggara pendidikan di Kabupaten Sumenep.

Kedua, agar penyelenggaraan otonomi pendidikan di Sumenep berjalan efektif, perlu dibentuk komisi reformasi pendidikan yang berfungsi untuk memeberikan pertimbangan kepada pemerintah tentang penyelenggaraan otonomi pendidikan di Sumenep, baik berupa konsep perencanaan, hasil pengamatan terhadap pelaksanaan pendidikan, dalam hal penentuan standar mutu pendidikan.

---

[21] Hasbullah, *Kebijakan Pendidikan*; *dalam perspektif teori, aplikasi dan kondisi objektif pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 141-142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketiga, secara geografis Sumenep tidak hanya terdiri dari daratan *an sich*, tetapi juga terdiri daerah dan kepulauan, yang notabene memiliki andil yang sangat besar dalam menyumbangkan PAD Sumenep. Oleh karena itu, pendidikan masyarakat kepulauan juga menjadi keharusan untuk diperhatikan. Artinya, kualitas pendidikan masyarakat kepulauan juga menjadi bagian integral dari konsep pemerataan pendidikan secara umum, sehingga pengembangan kualitas pendidikan tidak hanya terkesan menganak emaskan daerah daratan, dengan mengenyampingkna daerah kepulauan.

Keempat, pelaku pendidikan diharapkan memiliki kasadaran dan komitmen yang tinggi terhadap profesionalitasnya agar mampu membentuk SDM yang berkualitas, dengan tetap memperhatikan beberapa hal, antara lain kesejahteraan yang layak, mutasi dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan para pelaku pendidikan.

Bagi Kiai Busyro, pendidikan merupakan prioritas utama yang menjadi agenda pemerintahan daerah, karena pendidikan merupakan kekuatan utama dalam keseluruhan pembangunan yang dilakukan, terutama terhadap masa depan ekonomi.[22]

Setidaknya, terdapat beberapa hal yang penting yang telah diupayakan oleh pemerintah dalam membangun Kabupaten

[22] Karim, *Jejak*, 137-138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumenep. *Pertama,* pembangunan infrastruktur yang sangat urgen terus diupayakan mendekati penyempurnaan, karena dengan ketersediaan infrastruktur yang nyaman dan lengkap, maka setiap aktivitas sosial masyarakat akan menjadi lancer. *Kedua,* persoalan birokrasi yang terus dibangun agar bisa memberikan layanan yang memuaskan terhadap masyarakat, maka reformasi birokrasi telah dijadikan sebagai bagian dari semangat dalam pengelolaan pemerintah Kabupaten Sumenep, sehingga bisa memberikan pelayanan publik yang pro rakyat dan melaksanakan pemerintahan yang mampu mengemban tugas dengan baik dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan kemasyarakatan serta bisa menjadi masyarakat yang madani. *Ketiga,* pembangunan SDM masyarakat Sumenep yang berkelanjutan, karena dengan peningkatan SDM akan memberikan dampak yang nyata untuk mewujudkan kabupaten yang bermartabat dan berwibawa.

Pada tahap implemenetasi suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan saja, jika program teresebut tidak diimplementasikan dengan baik, walaupaun kebijakan itu benar adanya. Oleh karena itu, kebijakan yang telah diambil sebagai *problem solving* terhadap badan-badan administrasi dan agen-agen di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diamabil dapat memobiliasasi finansial dan sumber daya manusia sehingga dapat kompetitif dan berdaya sinergi. Hal yang tidak jarang implementasi kebijakan ada ada yang mendapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dukungan, bahkan ada beberapa hal lain yang mungkin ditentang oleh para pelaksana di tingkat bawah, bahkan juga kadang ditentang ditolak oleh berbagai masyarakat dan organisasi kemasayarakatan.

B. Relasi elite Pesantren dengan Pemangku Kebijakan

1. KH. Dr. A. Safraji

Kiai Safraji menyelesaikan pendidikan formal di dua pesantren besar di Sumenep yakni Al-Amin Parenduan dan An-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep dan pendidikan terhirnya adalah doktor UIN Sunan Ampel tahun 2014. Aktifitasnya dalam organiasi adalah GP. Ansor Sumenep, Katib Suriyah PCNU (2000-2005), sekarang adalah ketua MUI Sumenep[23] sekaligus Pengasuh di Pondok Pesantren Aqidah Usymuni Tarate Sumenep bersama istrinya Ny. Hj. Dewi Khalifah, MH.

a. Profil Pesantren Aqidah Usymuni

Pendiri pesantren di Terate[24] adalah KH. Zainal Arifin beliau meninggal 1953 yang selanjutnya dilanjutkan oleh Kiai Usymuni dan adiknya yakni kiai Takiyuddin dan kiai Shaleh. Pada tahun 1964 dibukalah lembaga pendidikan tingkat dasar yakni Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Diniyah. Selanjutnya pada tahun 1969 sebagai lembagaa lanjutan dibuka Madrasah Tsanawiyah, melihat antusiasnya masyarakat maka pada pesantren Tarate tersebut, sehingga

[23] Majalah *Iqra'* 2005. Edisi 14, 1426 H, 36.

[24] Penngagas adalah oleh Kiai Zainal Arifin yang masih sederhana yang awalnya adalah berupa dilakukan selesai Shalat Dhuha dan Ashar kitab yang diajarkan berkaiatan dengan ilmu tahuhid, akhlaq dan ilmu alat (nahwu, sharraf) sedangkan setiap malam juma'at setelah maghrib para santri mengadakan pembacaan shalawat diba'. Lihat dalam Iwan Kuswandi, *Kerapun Bisa Mengaji: Rekam Jejak Sejarah Islam di Madura* (Yogyakarta: Lembaga ladang kita, 2015), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintah Kabupaten Sumenep teruatam Depatemen Agama pada waktu itu memberi penawaran agar sekolah itu di negerikan, sebagai kepala MI nya adalah Bapak Abd. Syakur, sedangkan Kiai Takiyuddin diangkat menjadi Kepala MTs Megeri Tarate.[25] Samapai saat sejak tahun 2007 berdiri Sekolah Tinggi ilmu Tarbiyah Aqidah Usymuni (STITA) Sumenep jurusan PAI dengan SK. Derjen Pendis/No: Dj.I/220/D/2007 dan telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan No. 032/BAN-PT/Ak.XV/S1/X/2012.[26] Saat ini juga telah bertambah dua program studi baru yakni Pendidikan Bahasa Arab (PBA) dan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidiyah (PGMI) pada tahun 2015 dengan SK Dirjen Pendis nomor: 361 tahun 2015.[27] Selian itu Yayasan Aqidah Usymuni menyelenggaran Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Madrasah Diniyah (MD) Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA), semua jenjang telah dimiliki oleh pesantren Aqidah Usymuni di bawah naungan yayasan Aqidah Usymuni di bawah kepemimpinan Ny. Hj, Aqidah Usymuni. Adapun jumlah santri tkurang lebih 500 santri, baik berasal daratan Sumenep maupun berbagai kepulauan seperti dari pulua Raas, podai, giliyang, kangean dan Sepudi.

b. Kebijakan Pendidikan Sumenep

Membahas tentang kebijakan pendidikan di Sumenep beliau berpandangan sebabagai berikut:

[25] Ibid., 76
[26] Lebih jelasnya lihat dalam Album Wisuda ke-6 STITA Sumenep tahun 2015.
[27] Observasi dan dan dokumentasi Pesantren Al-Usymuny, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasca reformasi banyak para elite pesantren yang maju diarena politik praktis yang punckanya, tahun 2000 baru pertama sejak masa orde baru kali ini pada era reformasi Sumenep di pimpin oleh elite pesantren yakni kiai. Selera kepimimpinan sangat berbeda dengan masa orde baru mengalami perubahan terutama dalam memajukan pendidikan agama.

Implementasi kebijakan sudah mulai ada perubahan orentasi sejak dimpin oleh elit pesantren pasca Reformasi hal ini dilakukan tanpa harus membedakan antara daratan dan kepulauan, maka perlu dukungan semua pihak dan baik pesantren dan ormas seperti NU dan Muhamadiyah harus dilibatkan dalam upaya memajukan pendidikan Sumenep. Baik pendidikan formal yang diakui oleh pemerintah informal dalam keluarga dan non-formal seperti pengajian dan berbagai kegiatan kelompok masyarakat baik berupa kajian dan keterampilan.[28]

2. K. Husnan Nafi', M. Pd.

Husnan Nafi' adalah satu elite pesantren di pondok Pesantren an-Nuqayah Guluk-Guluk Sumenep beliau adalah alumni UIN Suka Yogykarta dan kandidat Doktor UIN Maliki Malang. Saat ini adalah PK II INSTIKA Guluk-Guluk yang sebelumnya adalah PK III di Instutusi yang sama, selain itu adalah ketua Pimpinan Cabang Ikatan Sarjana Nahlatul Ulama' (PC ISNU) Sumenep.

a. Profil Pesantren An-Nuqayah Guluk-Guluk

Sumenep, merupakan daerah tempat pesantren Annuqayah yang berada di barat laut Bukit Lancaran, merupakan daerah yang relatif tidak tersentuh pola keberagaman "radikal''. Sejak pesantren itu didirikan, yakni pada 1887 sampai saat ini, wilayah itu tidak pernah

[28] KH. A. Safraji, *Wawancara*, Sumenep, 27 Mei, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami gejolak atau kerusuhan sosial bernuansa keagamaan yang cukup berarti.

Nilai-nilai keagamaan yang dianut pesantren yang didirikan oleh KH. Moh. Syarkawi itu dan tradisi yang diembangkan tidak dapat dilepaskan dari penamaan pesantren ini dengan nama *al-Nuqayyah.* Sebuah nama yang merujuk kepada salah satu kitab karya Imam al-Sayuti. Secara perspektif pesantren Annuqayah, signifikansi karya tersebut selain terletak pada keberadaannya sebagai karya ulama bermadzhab "Ahlussunnah wal jama'ah," karangan tersebut merupakan kitab ontologis yang membahas tentang berbagai disiplin ilmu yang mencakup sampai empat belas ragam keilmuan, dari yangbersifat keagamaan murni sampai ilmu pengetahuan yang tidak dimiliki hubungan langsung dengan syari'ah.[29]

Waktu pondok Annuqayyah hendak didirikan, masyarakat Guluk-guluk dan masyarakat Madura secara umum sedang dilanda drisis identitas budaya yang berlangsung sejak bangsa Belanda masuk ke wilayah itu. Nilai dan pola kehidupan masyarakat religius telah dikikis secara sangat sistematis oleh koloniaisme sehingga menimbulkan ketidakpastian, ketidak hormonisan hubungan sosial dan relativisme moral.[30] Kondisi semacam ini kian mendekatkan orang Madura dengan

[29] Lihat al-Sayuti, Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abu Bakr, *Itmam al-Dirayah li Qurra'i al-Nuqayah al-Jami' li Arba'ati Asyara lim,* (Surabaya: Makbatah Wa Mathba'ah Sa'ad Ibn Nashr Ibn Nabhan, tth), 3.
[30] Lihat Bisri Effendi, *Annuqayah: Gerak Transformasi Sosial di Madura*, (Jakarta: P3M, 1990), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wataknya yang keras ke dalam kehidupan yang sarat kekerasan. Carok, suatu perkelahian massal atau antar perorangan yang bertujuan saling membunuh lalu jadi "tradisi" yang meluas di hampir semua masyarakat Madura,[31] termasuk masyarakat Guluk-guluk saat ini. Kondisi semacam itu, KH. Moh. Syarqawi datang ke desa Guluk-guluk dengan hasrat memimjam ungkapan Taufik Abdullah untuk mengadakan transformasi sosial.[32] Sama dengan sejarah pesantren lain, Annuqayah memerlukan waktu cukup lama sebelum masyarakat setempat menerima kehadirannya. Bahkan, pada awalnya, pendiri Annuqayah itu mendapat tantangan cukup serius dari sebagian besar warga masyarakat. Akan tetapi, berkat ketulusan, moderasi, dan toleransi yang ditampakkan pendirinya, serta masyarakat mulai menyadari kelemahan dan kekurangan pola kehidupan yang selama ini merka jalani, akhirnya mereka, lambat laun, menerima pola kehidupan yang ditawarkan oleh KH. Moh. Syarqawi.

Selanjutnya, komunitas Annuqayah juga terlibat aktif melakukan kajian-kajian tentang agama, politik, dan sebagainya malalui organisasi-organisasi sosial keagamaan yang ada di Sumenep. Melalui kegiatan ini, masyarakat bersama pesantren kian memiliki kemempuan untuk membedakan antara ajaran dan nilai-nilai agama di satu pihak, dan "radikalisme agama'' di pihak lain. Berdasarkan dialog dengan

[31] Ibid, 31.
[32] Lihat Taufik Abdullah, *Islam dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia,* (Jakarta: LP3ES, 1987), 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tokoh-tokoh intelektual dan ulama, masyarakat mengetahui serta menyadari bahwa radikalisme agama tidak lebih dari sekadar politisasi agama yang tujuannya lebih berorientasi kepada kekuasaan atau melanggengkan kekuasaan. Dalam pandangan sebagian besar mereka, radikalisme atau dan bentuk kekerasan-kekerasan yang lain, tidak akan pernah menyelesaikan persoalan, justru akan menimbulkan persoalan baru.

Pada skala lokal, pola pendekatan Annuqayah itu merupakan salah satu unsur utama yang cukup kondusif dalam pengembangan kehidupan yang relatif jauh dari bentuk-bentuk radikalisme agama. Sedang pada skala makro, pesantren secara tumbuhnya radikalisme agama, serta tidak pernah menyebarkan ajaran Islam yang ekstrim. Sungguhpun demikian, perlu disadari bahwa fenomena lokal dan global masih menyisakan potensi yang cukup besar untuk terjadinya kekerasan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Sumenep. Kemungkinan ini perlu disikapi secara kritis dan arif oleh Annuqayah secara khusus, masyarakat Sumenep, pesantren-pesantren yang lain dan bangsa Indonesia, secara keseluruhan.[33]

b. Kebijakan Pendidikan Sumenep

Berbicara tentang relasi elite pesantren dan kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep beliau mengungkapkan.

[33] Abd A'la, *Pembaharuan Pesantren,* (Yokyakarta, LKiS, 2006) 66-67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Para elite pesantren yang berada di wilayah birokrasi diharapkan untuk terus lebih maksimal dan konsen pada pendidikan pesantren, karena di Madura Sumenep adalah Kabupaten yang paling banyak memiliki pesantren dari pesantren besar dan berbagai pesantren kecil di setiap Desa dan Kampung. Hal ini penting karena pesantren sebagai pencetak genersi yang harus diimbangi dengan religiusitas yang sesuai dengan sosio-kultural Sumenep. Hal ini penting agar orang-orang pesantren tidak diaanggap kacang lupa akan kulitnya.[34]

Melihat fenomana kebijakan pendidikan di Sumenep berjalan biasa sejauh ini masih berjalan biasa, tidak ada yang terlalu istimewa dulu memang ada Bantuan Penyelanggraan Pendidikan (BPP) itu diapresisi dan dan ada Bantuan Operasional Manajemen Mutu Madrasah, tapi itu jumlahnya sedikit sekitar 10.000.000-, dan sekarang malah bantuan beasiswa kuotanya dikurangi, mestinya harus ditambah untuk meningkatkan SDM generasi Sumenep secara khusus pada pesantren yang secara kuantitas tinggi sebaran jumlahnya dibanding lembaga pendidikan lainnya. Hal ini penting sehinngga kedepan pemangku kebijakan pendidikan Kabupaten Sumenep harus bisa memetakan potensi lembaga pendidikan akan dapat dikelola dan maju sesuai dengan perkembangan zaman.

Merespons kebijakan pemerintah Kabupaten Sumenep tentang kebijakan pendidikan harus ada *roadmap* bagaimana menata pesantren tidak hanya berprestasi secara akademik, namun juga menonjolkan nilai religiusitas yang kental dalam pendidikan pesanttren. Kedepan Pemda kabupaten Sumenep wajib menggandeng para tokoh pendidikan terlebih tokoh pesantren agar dapat memnimalisir berbagai hal yang cenderung berseberangan dengan kebutuhan masyarakat bawah. Sehingga terjadi sinergi antara pemerintah daerah dalam memajukan sumber daya manusia tidak hanya pada pengembangan pariwisata, karena kunci kemajuan bangsa ini adalah pembenahana di bidang pendidikkan.[35]

3. K. A. Dardiri Zubairi, S.Ag., S. Pd.

Dardiri menyelesikan pendidikan dari tingkat dasar sampai menengah di Madrasah Nasy'atul Mutaallimin, beliau adalah alumnii

[34] K. Husnan Nafi', *Wawancara*, Sumenep, 01 Juli, 2016.
[35] K. Husnan Nafi', *Wawancara*, Sumenep, 01 Juli, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

IAIN Jakarta (UIN Syaarif Hidatullah), ia aktif diberbagai organisasi sejak masih kuliah dan kenasayarakatan pernah menjadi direktur LakpesDam NU Sumenep 2005-2010, Sekeretaris PCNU Sumenep (2010-2015).[36] Saat sekarang ini adalah wakil ketua PCNU Sumenep 2015-2020, kompolan "*tera' bulen*". Aktif menulis diberbagai media online dan buku, serta termasuk penggiat pendidikan dan juga termasuk salah satu Pengasuh di Pondok Pesantren Nasy'atul Muta'allimin Gapura Timur Gapura Sumenep.

a. Profil Pesantren Nasy'atul Mutaallimin

Pesantren Nasy'atul Mutaallimin (Nasa) secara resmi berdiri tahun 1961, meski *defacto* ia telah ada jauh sebelum 1950-an. Pada awalnya, cikal bakal pesantren ini bemula dari pengajian kitab kuning yang diselenggarakan secara individual oleh KHA. Zubairi (meninggal 25 April 2004). Ketika itu beliau baru kembali dari Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk, pesantren tertua di Sumenep yang lokasinya 40 km ke arah barat dari Pesantren Nasa. Di samping kitab kuning, beliau juga memberi kursus bahasa arab, nahwu, dan sharraf. Pengetahuan ini di pesantren dikenal sebagai "ilmu alat", karena fungsinya sebagai "pintu masuk" untuk memahami kitab kuning.

Pendirian pesantren "Nasy'atul Muta'allimin" didasarkan atas tujuan mengembangkan pendidikan keagamaan dan pembentukan

[36] Lebih lengkapnya lihat dalam Biografi A. Dardiri Zubairi dalam buku *Rahasia Perempuan Madura* (Surabaya: Al-Afkar press, 2013).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akhlak al-karimah. Tujuan itu mengacu pada tradisi keagamaan aswaja sebagaimana tertuang dalam kitab kuning yang umumnya menjadi rujukan pandangan keagamaan pesantren.

Meski resminya berdiri tahun 1961, sejak tahun 1950-an sebenarnya sudah ada beberapa orang yang menetap di kediaman KHA. Zubairi, di samping beberapa orang yang pulang pergi (santri kalong). Sedikitnya jumlah santri tidak menurunkan semangat KHA. Zubairi. Dengan semangat keikhlasan beliau menghabiskan waktu dan tenaganya untuk menyemai pendidikan keagamaan. Apalagi dalam tradisi pesantren diajarkan untuk selalu mengamalkan ilmunya dengan menyebarluaskan kepada masyarakat secara *ikhlas*.

Usaha pengembangan pendidikan sebagai cikal-bakal lahirnya pesantren makin menemukan titik terang setelah adik beliau, KH Moh. Asy'arie dan K. Ja'far (meninggal 1975) juga kembali dari pesantren Annuqayah Guluk-Guluk. Wujudnya, pada tahun 1959 didirikanlah Pesantren "Al-Marzuqi", nama yang diambil dari ayah beliau KH. Marzuqi, karena jasanya yang juga memberikan pendidikan agama ketika beliau masih hidup.[37]

1) Mendirikan Pendidikan Formal

Seiring dengan besarnya minat masyarakat terhadap pendidikan agama, pesantren al-Marzuqi pada tahun 1961

[37] Dokumen Pesantren, Nasy'atul Muta'allimin, 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendirikan lembaga pendidikan formal yaitu Madrasah ibtidaiyah (MI) “Nasy-atul Muta’allimin”. Nama “Nasy-atul Muta’allimin” sendiri yang berarti “tumbuhnya para pelajar” diambil untuk menggambarkan kesadaran masyarakat yang mulai meningkat terhadap pendidikan pada masa itu. Saat itu pula nama “Nasy-atul Muta’allimin” dijadikan nama pesantren menggantikan nama “Al-Marzuqi” sebelumnya.

Pada tahun 1973 “Nasy-atul Muta’allimin” membuka pendidikan formal lanjutan yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) untuk menampung lulusan MI yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tetapi pada tahun 1974 MTs bubar, karena siswanya yang tadinya berjumlah 15 orang terus berguguran. Alasan *drop out*-nya siswa terkait dengan tradisi orang Madura yang menikahkan anaknya di usia dini.

Pada tahun 1977 pendirian MTs “Nasy-atul Muta’allimin” dirintis kembali. Usaha yang kedua kalinya ini tidak sia-sia, karena perkembangannya terus mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 1986, “Nasy-atul Muta’allimin” terus mengembangkan pendidikannya dengan membuka Madrasah Aliyah (MA). Dan pada tahun 1998 membuka TK “Nasy-atul Muta’allimin”. Jumlah siswa-siswi dari TK hingga MA saat ini lebih kurang berjumlah 750. Sementara yang tinggal di pesantren berjumlah 250 putra-putri yang rata-rata datang dari Kabupaten Sumenep sendiri. Baik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berasal dari wilayah daratan Sumenep sperti Gapura, Kolpo, legung Batang-batang, Rumben guna, Rumben rana, Rumben Barat dan dari berbagi kepulauan seperti Poteran Talango Giliyang Dungkek.

2) Pengembangan Masyarakat

Pada masa-masa awal, peran kemasyarakatan pesantren "Nasy-atul Muta'allimin"dilakukan secara individual oleh pengasuh dan fokusnya pada penguatan wacana keagamaan dan pembentukan pribadi yang ber-*akhlak al- karimah*. Media yang digunakan melalui *tahlilan* yang dilakukan dari rumah ke rumah di masyarakat sekitar pesantren. Di samping itu, pengasuh juga membuka pengajian kitab kuning untuk masyarakat umum yang ditempatkan di pesantren sendiri.

Pada awal decade 80-an baru pesantren "Nasy-atul Muta'allimin" mengenal konsep "pengembangan masyarakat" (*community Development*) melalui Biro Pengabdian Masyarakat Pondok Pesantren Annuqayah (BPM-PPA) yang saat itu bermitra dengan LP3ES, Jakarta. Programnya ketika itu adalah *income generating* melalui usaha simpan pinjam bagi masyarakat miskin yang di "Nasy-atul Muta'allimin" ditangani BHM (Biro Hubungan Masyarakat), salah satu lembaga yang dibentuk untuk melakukan tugas-tugas pengembangan masyarakat. Tetapi BHM tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertahan lama karena tidak didukung kapasitas kelembagaan dan SDM pengurusnya yang memadai.

Usaha pengembangan masyarakat dirintis kembali sejak akhir decade 90-an bekerjasama dengan BPM Annuqayah-Yayasan Dian Desa, Yogyakarta dalam pengembangan air minum melalui tenaga sinar matahari (SODIS). Dan pada tahun 2002, pesantren "Nasy-atul Muta'allimin" bekerjasama dengan KKK-CGI dalam program "Pendidikan Kedamaian Berbasis Pesantren". Kuatnya kembali kesadaran pesantren untuk menegaskan peran kemasyarakatanya, pada tahun 2003 dirintis kembali lembaga yang menangani pengembangan masyarakat melalui LPPM (Lembaga Pengabdian dan Pengembangan Masyarakat). LPPM saat ini sedang melakukan penguatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*).[38] Tentunya semua ini dilakukan demi kemjauan dan kualitas pendidikan pesantren tetap menjadi pilihan masyarakat yang tetap bisa terus aksis dalam mencerdaskan dan menjaga moraliatas bangsa.

b. Kebijakan Pendidikan Sumenep

Sebagai seorang tokoh pendidikan sekaligus sebagai seorang elite pesantren beliau memaparkan tentang kebijakan pendidikan di Sumenep.

[38] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> Keberandaan elite pesantren atau tampilnya tokoh elite pesantren sebagai pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep adalah bagaimana elite pesantren dapat melakukan dan menerjemahkan visi kepesantrenan dengan melakukan *grand design* pendidikan demi kemaslahatan umum. Salah satunya bagaimana pendidikan Sumenep tidak kehilangan jati diri pendidikan Sumenep yang harus mengedepankan *wisdom* tidak hanya pada asahan otak saja. Sehingga tampilnya elite pesantren suatu hal lumrah pada era demokrasi selama mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam kepemimpinan dan harus ada pengganti atau regenerasi ketika ia menjadi pemangku kebijakan seperti jadi Bupati atau anggota legislatif. Hal ini terbukti para elite pesantren yang awalanya dia asuh sampai saat ini, masih ada dan terus mangalami kemajuan bahkan sudah membuka perguruan tinggi di pesantren yang pernah elitenya menjadi Bupati.
>
> Ada lagi contoh berupa bantuan Poskestren satu sisi baik, tapi sisi yang lain kurang manfaat, karena menghilangkan profesi dukun yang secara tradisional dan berbagai obat herbal dan natural menjadi kurang efektif bagi berbagai pengembangan pendidikan kesehatan pada masa depan. Ada juga Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan (B2P) untuk tingkat SMA/MA/SMK itu sudah diberlakukan di Kabupaten Sumenep sebelum ada BOS untuk tingkat SMA/MA dan SMK. Namun, setelah wajib belajar 12 tahun diberlakukan bantuan ini dihapus, seandainya bantuan ini dialihkan terhadap pengembangan pendidikan baik peningkatan SDM guru dan berbagai peningkatan sarana pendidikan demi kemajuan pendidikan di Sumenep. Ada juga bantuan BOSDA dan penyetaraan Diniyah Takmiliyah, saya pribadi tidak setuju ketika semua pendidikan pesantren diformalkan. Walaupun ada koreksi saya yakin seandainya bukan elite pesantren seperti sebelum reformasi saya yakin tidak ada peningkatan kualitas pesantren baik secara kualitas ataupun secara kuantitas.[39]

Hal terkait dengan kebijakan dan kekusaan seperti pandangan Hartilar dan Riant Nogroho merupkan dua tokoh ahli kebijakan mengatakan, bahwa ‘kekusaan yang diimplmentasikan dalam proses

[39] A. Dardiri Zubairi, *Wawancara*, Sumenep, 31 Mie 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan adalah *(regulated power)* selain itu juga muncul kekusaan yang menindasi yaitu memberikan kebebasan agar tidak seperti robot-robot yang hanya sekedar hidup adanya instik beleka' maka di bawah situasi dan kekuasaan yang mengatur bekembanglah pribadi manusia melaui proses pendidikan menuju kehidupan masyarakat yang aman dan tertib yang diatur oleh kekusaan pubik.[40]

> Pandangan di aatas seperti disampaikan A. Dardiri relasi elite punya keterkaitan implementasi kebijakan pendidikan di Sumenep memang ketika berasal dari elit pesantren baik untuk kepentingan masyarakat secara umum kita harus dukung jika tidak baik harus kita kritisi dan harus ada filter tidak harus semua diformalkan. Contoh seperti Perda bebas buta Baca aksara al-Qur'an,[41] kami terang-terang menolaknya dan sampai saat ini tidak jalan, karena terjadi banyak penolakan dari berbagai kalangan, karena dinilai berbahaya dan cenderung komersil-pragmatis. Hal senada disampaikan oleh K. Rahwini Raperda ini sangat sulit implementasinya, lebih baik ada kebijakan bupati di bawah satuan pendidkan baik Diknas atau Kemenag untuk mendorong semangat membaca al-Qur'an dengan lebih memberdayakan TPA dan TPQ yang sudah berjalan.[42]

Beriikut respons masing pihak terhadap raperda Bebas Buta Aksara al-Qur'an:

Tabel 4.1

---

[40] Hartilar dan Riant Nugroho, *Kebiajakan Pendidikan; Pengantar Mengenai Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik* (Bandung: Remaja Roda Karya, 2012), 447.

[41] Dardiri juga menegaskan munculnya Raperda adalah bentuk kehabisan akal elite kita dalam menyelesaikan masalah yang sebenarya bisa diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Satu contoh anak saya masih kelas 2 MI sudah lancar membaca al-Qur'an, karena uminya setiap malam rajin mengajari dan mengaji mengaji pada seorang ibu yang ikhlas dikampung saya. Anak saya bisa baca al-Qur'an dengan baik bukan karean perda. Lihat dalam Majalah Suara Pendidikan, Ketika Elite Kita kehabisan akal. Lebih lengkapnya Lihat dalam Majalah Suara Pendidikan, No. 02/Januari-Maret. 2013, 41-41.

[42] Suara pendidikan Edisi III/tahun II/2013, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

No	Unsur	Person	Sikap	Alasan
1	NU	K. A. Dardiri	Kaji Ulang	Mayoritas kalangan NU Menolak, namun belum dibahas secara di Internal NU
2	Kemenag dan Muhammad iyah	Moh. Yasin	Kaji Ulang	Perlu pnyesuaian dengan karakter dan kebutuhan masyarakat
3	GP Ansor	Suryadi	Menolak	Kitab Suci bagian dari negara dan tidak perlu intervensi negara dan hanya menghamburkan anggaran daerah
4	PC PMII Sumenep	Ali Makki	Menolak	Semangat belajar telah berjalan dinamis dan tidak butuh Raperda
5	STKIP PGRI Sumenep	H. Ahmad Junaidi	Menolak	Tidak didukung dengan data da fakta yang jelas
6	Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)	H. Athaurrahman	Menolak	Bisa merampas hak masyarakat dalam belajar al-Qur'an
7	Guru Ngaji	KH. Rahwini dan K. Hantok	Menolak	Implementasi akan kesulitan
8	Pesantren	K. Mustofa	Menolak	Formalisasi akan menghapus kultur pengajian al-Qur'an
9	Forkim	KH. Jurjiz Muzammil	Menerima	Klaim ada pihak luar yang bekepentingan
10	Diknas	Fajarisman	Menerima	Dibutukan masyarakat dan peraturan lanjutan pasca Rapeada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

11	MUI	KH. Baidlawi	Menerima	Dibutuhkan masyarakat

Sumber: Suara Pendidikan 2013 dengan revisi

Berbicara ketika ada elite pesantren menjadi pemimpin (*rato*), maka bisa ditelaah relasi elite pesantren ini mempunyai modal dalam proses awal baik relasi dengan santri atau dengan pemangku kebijakan di Kabupaten Sumenep pandangan peneliti setidaknya ada 6 hal yang punya kecenderungan dengan diawali berbagai hal sebagaimana berikut:

1. Adanya kharisma[43] sebagian elite pesantren yang masih ada dan menjadi rujukan untuk memilih dengan suatu argumentasi tidak etis karena ada hubungan spriritual (guru dan murid). Hal ini hampir terjadi diberbagai pesantren *salaf* di Sumenep. Selain itu kepercayaan masyarakat masih kuat terhadap kiai dan pesantren baik dalam bidang sosial, politik pendidikan dan ekonomi. Hal ini karena pesantren masih menjadi sandaran religius yang masih relatif tinggi dan masih mendapat apresiasi dari masyarakat. Meminjam perspektif Azra kharismatik dapat bernuansa moral karena kharisma tersebut pada umumnya, bermuara pada otoritas kegamaan dalam masalah kedalaman ilmu, ketinggian pribadi, pengelolaan hati-hati dalam hubungan personal.[44] Baik hubugan dengan Tuhan dan sesama manusia.

   Suatu kekuatan kharisma dengan kekuatan berupa pikatan ke dalam ilmu dan keagamaan, maka kiai lewat lembaga pesantren-nya tidak saja

[43] Model kepemimpinan kharismatik meminjam perspektif A'la adalah bagaimana pemimpin pesantren perlu direkonstruksi secara kreatif berdasarkan nilai-nilai dan modernitas Islam itu sendiri. Lihat dalam Abd. A'la, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 24.
[44] Azyumardi Azra, *Koteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam* (Jakarta: Paramadina, tt), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melayani pendidikan masyarakat, dakwah keagamaan, pendampingan dan pembelaan pada kaum yang tertindas, tetapi juga menjadi pemain politik (*political actor*) yang cantik di atas panggung kekuasaan. Kiai dalam penjelasan demikian adalah pribadi yang kompleks, tidak saja bergelut pada wilayah keagamaan karena ahli agama, melainkan juga menjalankan fungsi-fungsi sosial lain sesuai dengan kebutuhan dan tantangan masyarakat.

2. Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh elite pesantren mempunyai kedekatan yang koheren selain sebagai pemimpin pesantren sekaligus lebih punya *power* atau otoritas atau punya kuasa (pemerintah). Karena para elitnya berada dalam jabatan strategis, seperti eksekutif dan legislatif. Hal ini terjadi pada lembaga pendidikan seperti yang tejadi di Pesantren Nurul Islam Karang Campaka, Bluto, Pesantren al-Karimiyyah Beraji Gapura[45] Pesantren at-Taufiqiyah Aeng Baja Raja Bluto[46] Pesantren al-Aswaj Ambunten.[47] Pesantren an-Nuqayah Guluk-Guluk Lubangsa raya.[48]
3. Para santri dapat diarahkan pada sebuah organisasi atau partai politik atau bahkan calon tetentu. Kejadian ini terjadi di berbagai pesantren yang mempunyai relasi dengan partai politik sebagaimana tersebut di atas. Ketika pesantren peran sosial-politik, pendidikan dan ekonomi pesantren

[45] Dua pesantren ini relasi elit pesantren dengan jabatan politik lebih kuat karena sama-sama dua periode menduduki posisi eksekutif (Bupati) adapun pesantren lain lebih pada posisi legislatif dari tingkat Pusat, legistaif tingkat I dan legislatif II.
[46] Elitenya menjadi anggota DPRD Kabupaten Sumenep 2009-2014.
[47] Elitenya menjadi anggota DPRD 1999- 2004 Kabupaten Sumenep dan Aggota DPRRI 2009-2014
[48] Elitenya menjadi anggota DPRD 1999- 2004 dan 2004 dan 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lemah, maka akan juga berakibat terhadap eksistensi pesantren di tengah masyarakat yang mempunyai peran ganda yakni sebagai pencetak kader *(mundzirul qaum)* dan pemberdaya umat *(taghyirul ummat)*.

Meminjam perspektif A'la signifikasi pemberdayaan umat berpulang pada kenyataan bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas terdiri dari komunitas muslim pada umumnya menetap di berbagai daerah pedesaan, karena satu sisi pesantren berkembang pada daerah-daerah pedesaan, pada titik tertentu pesantren merupakan representasi dari masyarakat muslim pedesaan. Mereka pada umumnya merupakan alumni atau hasil didikan dari pesantren.[49] Kondisi membuat alumni pesantren tertempa sejak awal dengan kesederhanaan, namun dengan kesungguhan.

4. Penyampaikan doktrin politik melalui pendidikan dan pembelajaran para elit pesantren kepada para santri. Kecenderungan ini muncul dengan diselipkan dalam proses pelaksanaan pendidikan di pesantren pada waktu interaksi pembelajaran baik *sorogan wetonan*, bandungan atau halaqah tiga metode ini akrab dan menjadi ciri khas pembelajaran dalam dunia pesantren[50] atau dengan berbagai macam cara baik dalam sela pembelajaran yang dicoba dikorelasikan dengan ideologi politik tertentu.

---

[49] Abd. A'la, *Pembaharuan Pesantren* (Yogyakarta: LKiS, 2006), 24.

[50] *Sorogan*, berasal dari kata Jawa yang berarati "sodoran atau yang disodorkan" pelaksanannya, adalah santri datang bersama kemudian menunggu giliran satu persatu, hal ini memungkinkan interaksi yang intens antara kiai dan santri, namun kurang efisiensi waktu. (2) *Bandungan*, sistem ini dikenal dengan sistem *halaqah* dimana para santri duduk melingkari kiai dalam satu majlis santri mendengarkan dan memberi makna atau catatan penting dalam kitab yang diajarakan. (3) *Wetonan*, berasal dari bahasa Jawa yang berarti berkala, yakni berupa pengajaran berjangka waktu tidak rutin tiap hari kadang setiap selesai shalat Jum'at atau sebagainya 1/5 bulan, dan sebagainya, dalam sistem ini santri tidak harus membawa kitab, ada yang dibaca secara berurutan kadang hanya mengambil atau memetik poin pentingnya saja, ada yang diberi arti secara utuh ada diberi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengaruh yang lebih luas dan jaringan kepemimpinan kiai yang lintas kota dan propinsi memudahkannya untuk menjalin komunikasi dengan pihak-pihak luar, baik pemerintah maupun swasta. Posisi kiai yang demikian kadang-kadang juga bisa memainkan peran pemerintah tentang pembangunan kepada masyarakat dapat lebih mudah menerima program pemerintah bila hal itu di sampaikan oleh seorang kiai.[51]

Fenomena ini semakin memperkuat posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan alternatif yang biasanya memiliki hubungan langsung dengan masyarakat di sekitarnya. Bahkan, pola patronase antara kiai dan masyarakat bisa menembus lintas kota dan propinsi. Pesantren juga dapat menghubungkan dengan wali santri di mana secara psikologis mereka merasa berhutang budi kepada kiai. Karena, anak-anak mereaka menimba ilmu dari kiai. Apalagi wali santri yang anak-anaknya mendapatkan pendidikan, konsumsi dan akomodasi secara gratis dari sang kiai.

5. Dakwah dalam organisasi kemasyarakatan sering menjadi sarana sosialisasi dengan argumentasi tidak langsung berupa selipan ucapan dalam kegiatan bersama masyarakat baik dalam organisasi formal atau organisasi (NU, Ansoar, Muslimat, Fatayat dan Muhammadiyah) non formal (Yasinan, Tahlilan, Diba'an atau barzanjian, sarwa-an Shalawatan dan Manaqiban) seperti mingguan atau bulanan dan bahkan ada yang menjadi penceramah atau *muballigh* biasa juga disebut kiai panggung.

---

arti secara bebas. Lihat Abbasi Fadhil, *Sejarah Pendidikan* (Sumenep: Al-Amien Printing, 2001), 172-173.

[51] Moesa, *Nasionalisme*, 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Ikatan alumni, salah satu kekuatan yang luar biasa, ketika kekuatan jaringan sosial politik kuat, maka ikatan ini akan semakin kuat dan perkasa. Hal ini biasanya terbentuk dalam organisasi ikatan alumni dan berbagai nama yang tidak jauh peran dan fungsinya.[52]

Secara skematis relasi kepemimipinan elite pesantren dengan pemangku kebijakan pendidikan di Kabupaten Sumenep adalah dapat dikelompokkan sebagai berikut;

Tipologi Relasi Elite Pesantren dengan pemangku Kebijakan Pendidikan di Sumenep.

Tabel 4.2

Pemimpin dan Tipe Kepemimipinan	**Relasi**	**Posisi**	**Dukungan Politik**	**Kebijakan Pendidikan**
KH. Ramdlan Siradj, SE., MM. Elegan Karismatik	Mutualisme politis Elitis kualitatif	Elite Pesantren sebagai pemagku kebijakan	Pastisipasi Aktif Partisipasi Pasif	Alokasi APBD lebih pada pembangunan pendidikan bebasis Desa
Dr. KH. A. Busyro Karim, M.Si	Mutualisme politis	Elite Pesantren sebagai pemagku	Pastisipasi Politik Aktif	Alokasi APBD lebih berpihak pada Swasta

[52] Alumni pesantren menjadi alternatif, ketika terjadi kerapuhan-kerapuhan maka terjadi sosial-politik yang merana, adapun jaringan yang berdasar pada nilai religius akan lebih berdaya guna lama dan yang terpenting jaringan kiai tidak terhenti pada wilayah masyarakat pesantren, Lihat. Moh. Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam; Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga dan Masyarakat* (Yogyakarta: LKiS, 2009), 154.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tegas Berwibawa	Mutualisme politis	kebijakan	Pastisipasi Politik Aktif	Orentasi Pembangunan SDM
Dr. KH. A. Safraji Kesabaran berwibawa	Mutulisme strategis	Elite Pesantren murni	Tidak aktif dalam politik	Pemerataan pendidikan antara daratan an kepulauan
K. A. Dardiri, S.Ag., S.Pd. Kharismatik Profetik	Uatamakan Kualitas Pendidikan	Elite Pesantren murni	Tidak aktif dalam politik	*Grand design* pendidikan berbasis local *knowledge*
K. Husnan Nafi', M.Pd. Familiar bersahaja	Sinergi pendidikan antara prestasi akademik dan religius	Elite Pesantren murni	Tidak aktif dalam politik	*Roadmap* pendidikan pesantren berbasis religiusitas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id